

The book cover features a hand in a white shirt pointing at a bar chart with an upward-trending arrow. The background is a blurred city skyline. The title is in large, bold, red letters with a white outline.

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

(KAJIAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIK)

Marselino Wau, S.E., M.Si
Leniwati, S.E., M.Si.
Jhon Firman Fau, SE., M.E.



Marselino Wau, S.E., M.Si.



Leni Wati, S.E., M.Si.



Jhon Firman Fau, S.E., M.E.

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

(KAJIAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIK)

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GDP atau GNP lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mengandung makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh sistem kelembagaan pemerintah daerah maupun pusat. Buku ini akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi secara mendalam sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai pertumbuhan ekonomi. Adapun pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Buku ini akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi secara mendalam sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai pertumbuhan ekonomi.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5896-92-2



9 786235 896922

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI (KAJIAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIK)

Marselino Wau, S.E., M.Si.

Leni Wati, S.E., M.Si.

Jhon Firman Fau, SE., M.E.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI
(KAJIAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIK)**

Penulis : Marselino Wau, S.E., M.Si.
Leni Wati, S.E., M.Si.
Jhon Firman Fau, S.E., M.E.

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-5896-92-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual dan Empirik)”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GDP atau GNP lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pusat. Buku ini akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi secara mendalam sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai pertumbuhan ekonomi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Pertumbuhan Ekonomi melalui Otonomi Daerah	1
B. Berbagai Faktor Penyebab Fluktuasi Pertumbuhan Ekonomi	4
BAB 2 PERTUMBUHAN EKONOMI	9
A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	9
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi	11
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	15
BAB 3 BELANJA DAERAH DAN MODAL	19
A. Belanja Daerah.....	19
B. Belanja Modal	23
BAB 4 DANA PERIMBANGAN	27
A. Dana Alokasi Umum	28
B. Dana Alokasi Khusus	29
C. Dana Bagi Hasil (DBH)	30
BAB 5 PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH	32
A. Pendapatan Asli Daerah	32
B. Kinerja Keuangan Daerah.....	35
BAB 6 ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI.....	38
A. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal	38
B. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	39
C. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal	44
D. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	46

E. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	47
F. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	48
G. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	50
BAB 7 GAMBARAN UMUM LOKASI KAJIAN.....	52
A. Provinsi Sumatera Barat	52
B. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat	53
BAB 8 PENUTUP.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
TENTANG PENULIS.....	70



**TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI
(KAJIAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIK)**



BAB 1 | PENDAHULUAN

A. Pertumbuhan Ekonomi melalui Otonomi Daerah

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GDP atau GNP lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pusat.

Berikut ini adalah data tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat periode 2011-2018:

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera
Periode 2011-2018

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)								Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	3.28	3.85	2.83	1.55	-0.73	3.30	4.19	4.60	2.86
2	Sumatera Utara	6.66	6.45	6.08	5.23	5.10	5.18	5.12	5.18	5.63
3	Sumatera Barat	6.34	6.31	6.02	5.88	5.53	5.27	5.29	5.14	5.72
4	Riau	5.57	3.76	2.49	2.71	0.22	2.23	2.71	2.34	2.75
5	Jambi	7.86	7.03	7.07	7.36	4.21	4.37	4.64	4.71	5.91
6	Sumatera Selatan	6.36	6.83	5.40	4.79	4.42	5.04	5.51	6.04	5.55
7	Bengkulu	6.85	6.83	6.08	5.48	5.13	5.29	4.99	4.98	5.70
8	Lampung	6.56	6.44	5.78	5.08	5.13	5.15	5.17	5.25	5.57
9	Kep. B. Belitung	6.90	5.50	5.22	4.67	4.08	4.11	4.51	4.45	4.93
10	Kepulauan Riau	6.96	7.63	7.11	6.60	6.02	5.02	2.01	4.56	5.74
	Rata-Rata	6.33	6.06	5.41	4.93	3.91	4.50	4.41	4.73	5.04

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2019

BAB 2 | PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mengandung makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh sistem kelembagaan. Adapun pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. (Arsyad, 2010).

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2011). Iskandar (2013) menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu.

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari

BAB 3 | BELANJA DAERAH DAN MODAL

A. Belanja Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Pengertian Belanja menurut PSAP No. 2 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Belanja daerah menurut pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Secara teori, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan

BAB

4

DANA PERIMBANGAN

Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah. Transfer dana desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Simanjuntak, 2001).

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Halim dan Mujib, 2009).

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).

Dengan demikian Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

BAB 5 | PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

A. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008).

Menurut Mardiasmo(2004) bahwa pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB | ANALISIS 6 | PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Komponen utama dari penerimaan daerah yaitu pendapatan yang dapat berasal dari dana perimbangan yang akan sangat menentukan besaran belanja modal. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar alokasi belanja modal (Abdullah dan Nazry, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Wiraswasta, dkk (2018) tentang pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kota dalam wilayah Jawa Timur. Menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian Kasdy, dkk (2018) tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap pertumbuhan belanja modal dan implikasinya pada realisasi belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Melalui pembahasan tersebut penulis akan menjawab pertanyaan mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal kabupaten. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diketahui bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, semakin tinggi dana perimbangan maka semakin tinggi pula jumlah

BAB 7

GAMBARAN UMUM LOKASI KAJIAN

A. Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Empat tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi tiga provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Barat sebagai kabupaten tersendiri. Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya ibu kota provinsi Sumatera Barat yang baru ini masih tetap di Bukittinggi. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

BAB 8

PENUTUP

Melalui buku ini dapat kita ketahui bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, semakin tinggi dana perimbangan maka semakin tinggi pula jumlah belanja modal di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, semakin tinggi kinerja keuangan daerah belum tentu dapat meningkatkan jumlah belanja modal di Provinsi Sumatera Barat.

Dana perimbangan dan Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, semakin tinggi dana perimbangan atau kinerja keuangan daerahnya maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, semakin tinggi pendapatan asli daerah belum tentu semakin tinggi pula jumlah pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih baik maka kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah adalah melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya objek-objek yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2013, *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, : Jakarta : Salemba Empat
- Abdullah, Syukriy dan Nazry, Ramadhaniatun. 2015. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah-Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Junal Samudera Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 272-283
- Aditiya, Nanda Yoga dan Dirgantari, Novi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal KOMPARTEMEN*. Volume XV. No 1 Maret 2017
- Arini, Prima Rosita. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *JRAMB*. Volume 2 No 2 November 2016 ISSN : 2460-1233
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Barro, R. J. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), 103-205.
- Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga

- Susanti dan Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (studi pada Kabupaten/Kota di wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 183-191
- Suwandi, Kurni Adi dan Tahar, Afrizal. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*. Vol. 11, No.2, Desember 2015. Hal. 118-136
- Todaro, Michael, 2011. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Erlangga. Jakarta
- Wandira, 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap pengalokasi belanja modal. *Accounting Analysis Journal*. Volume 2 Nomor 1 (2013)ISSN 2252-6765
- Wiraswasta, Fani. Pudjihardjo, Putu Mahardika Adis. 2018. Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 5 No.2, Juni 2018, p 170-180

TENTANG PENULIS

Marselino Wau S.E., M.Si.



Lahir di Hiliamaetaniha, 16 April 1988. Pada tahun 2013 telah berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan. Selanjutnya beliau meneruskan Studi Ilmu Manajemen S2 nya pada Universitas Bung Hatta Padang. Kecintaannya pada profesi dan tugas yang diberikan, telah mengantarkannya untuk menjadi Dosen Universitas Nias Raya (Uniraya), Pada perjalanan di S2 beliau juga pernah mengikuti Simposium Nasional Magister 1 sebagai Pemakalah dengan Tema “ Peningkatan Daya Saing Pascarsajarana melalui Publikasi Ilmiah dan The 4TH International Conference on Asset and Facility Managemnet (ICASFAM) and The 4TH Sustainability Initiatives Case Study in Malaysia, Philippines an Indonesia (SIMPI) sebagai Presenter. padang, west Sumatera, Indonesia, Tahun 2017. Dan Pada Tahun 2019 beliau menikah dengan Imelda Mildiaty Zamili dan dikaruniai anak Laki Laki dengan Nama Kenzie Shan Wau. Dan pada tahun 2021 Pemenang Hibah pada Penelitian Dasar dan Pembinaan/kapasitas di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan pada 2021 pernah menjadi Narasumber di Instansi Pemerintah dengan Tema “Pelatihan Bimbingan Teknis Sosialisasi Kemudahan Berusaha” dan Beberapa jabatan strategis yang pernah penulis emban diantaranya Pada tahun 2021 menjabat Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan. Selanjutnya pada Tahun 2021 juga penulis diangkat menjadi Sekretaris Koperasi Sejahtera Universitas Nias Raya.

Leni Wati, S.E., M.Si.



Lahir di Koto Baru, pada tanggal 01 Juni 1977. Beliau menamatkan sekolah di SMA 02 Padang pada tahun 1996. Kemudian beliau melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) hingga lulus pada tahun 2001. Kemudian Pendidikan Magister (S2) diperoleh dari Universitas Bung Hatta dan lulus pada tahun 2020.

Pada tanggal 13 Mei 2019 beliau menikah dengan Ridwan Putra dan dikaruniai seorang putera dengan nama Muhamad Ridwan Thaqif. Pada tanggal 01 Oktober 2019 beliau bekerja di Badan Keuangan Daerah sebagai Kepala Sub. Bidang Perencanaan Anggaran PPKD hingga sekarang. Beliau juga pernah mengikuti Diklat Prajabatan Gol III, kemudian mengikuti Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah dan Pembiayaan Perjalanan Dinas Dengan Sistim At Cost, kemudian mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Jhon Firman Fau, S.E., M.E.



Lahir di Telukdalam 05 Juni 1989, Pendidikan Sarjana (S1) diperoleh pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan pada tahun 2012. Pendidikan Magister (S2) di peroleh dari Universitas Negeri Padang dan mengambil jurusan Ilmu Ekonomi dan lulus pada tahun 2017. Profesi sebagai dosen di embannya pada tahun 2017 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nias Raya (Uniraya). Pada Tahun 2019 beliau menikah dengan Anita Juliana Lase, SE dan dikaruniai seorang putri dengan Nama Joanna Priscilla Fau. Penulis beberapa kali menjadi Narasumber baik di instansi swasta maupun di pemerintahan, pada tahun 2018 menjadi narasumber di Rumah Kreatif BUMN BNI Nias Selatan dengan tema “Pelatihan Memulai Bisnis Dan Coaching Bisnis” selanjutnya dengan tema Pelatihan Kemasan Produk Dan Atributnya dan pada tahun 2021 di Instansi Pemerintah dengan Tema “Pelatihan Bimbingan Teknis Sosialisasi Kemudahan Berusaha” dan Beberapa jabatan strategis yang pernah penulis emban diantaranya Pada tahun 2018 - 2021 menjabat Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan. Selanjutnya pada Tahun 2021 juga penulis diangkat menjadi Sekretaris Prodi jurusan Manajemen Universitas Nias Raya.